



Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dewi Indriasih*, Aminul Fajri, Dinda Febriana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

Jl. Halmahera KM. 01, Mintaragen, Tegal Timur, 52121, Kota Tegal, Indonesia

Email: ^{1,*}dewi.indriasih@upstegal.ac.id, ²aminulfajri@upstegal.ac.id, ³dindafebriana00@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: dewi.indriasih@upstegal.ac.id

Submitted: 11/02/2022; Accepted: 18/05/2022; Published: 30/05/2022

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap pengelolaan dana desa pada kantor pemerintah desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Populasi dalam penelitian ini yaitu aparat pemerintah desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 19 desa. Teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan BPD dengan total 76 responden. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil dari Penelitian ini adalah: 1. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 3. Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 4. Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 5. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Komitmen Organisasi; Sistem Pengendalian Internal; Kompetensi Pemerintah Desa; Transparansi; Aksesibilitas Laporan Keuangan; Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Abstract—This purpose of this study is to determine the effect of commitment of village government organization, internal control system, village government competence, transparency, and accessibility of financial reports on the management of village funds at the village government office in Petarukan District, Pemalang Regency. The population in this study is village government officials in Petarukan District, Pemalang Regency, which consists of 19 villages. The sampling technique was a saturated sample consisting of the village head, village secretary, village treasurer, and BPD with a total of 76 respondents. This research was conducted using descriptive quantitative methods. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this study are: 1. The commitment of village government organization affects the Accountability of Village Fund Management. 2. The Internal Control System affects the Accountability of Village Fund Management. 3. The competence of the Village Government affects the Accountability of Village Fund Management. 4. Transparency affects Village Fund Management Accountability. 5. Accessibility of Financial Statements affects Village Fund Management Accountability

Keywords: Commitment of Village Government Organization; Internal Control System; Village Government Competence; Transparency; Accessibility of Financial Reports; Village Fund Management Accountability

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan besar yang ditandai dengan reformasi politik, diikuti dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas atas semua transaksi pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah, sehingga akuntansi merupakan kebutuhan utama pemerintah dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan khususnya pemerintah tidak boleh dianggap remeh (Rosyidi, 2018). Otonomi daerah diharapkan membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan kegiatan, pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Pemerintah desa diyakini bisa lebih melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang sebenarnya permasalahan yang lebih luas dan kompleks (Rosyidi, 2018).

UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pemutakhirannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan Desa atau desa adat, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang melakukan pengawasan mengelola urusan pemerintahan, atas dasar inisiatif, untuk kepentingan masyarakat lokal, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Menurut (Prabawa & Lukiasuti, 2017), Pembangunan desa tidak mungkin dari satu pihak saja, tanpa kerjasama berbagai kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tentu saja, alokasi besar pemerintah pusat untuk daerah pedesaan juga perlu memikul tanggung jawab yang besar. Selain itu, penggunaan alokasi dana desa rentan terhadap perilaku curang, yang dapat berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan harus dipercaya oleh masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat mencapai kemajuan yang berarti. Pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu komitmen organisasi yang bertujuan mengelola dana desa untuk memaksimalkan pencapaian organisasi. Orang yang berkomitmen dicirikan oleh keyakinan yang kuat terhadap tujuan organisasi, kesediaan untuk tinggal di organisasi selamanya, dan kesiapan untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.



Faktor kedua adalah sistem pengendalian internal. SPI merupakan bagian dari pendekatan atau rencana organisasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, akuntabilitas keuangan dapat dijadikan pedoman, dan diperlukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aramide, Sanusi, & Mustapha, 2015).

Faktor ketiga adalah kemampuan pengelola Anggaran Dasar Daerah untuk membuat ketentuan dasar agar akuntabilitas di desa dapat dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin. Kompetensi dapat mencakup wawasan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pemerintah tingkat desa dituntut memiliki perangkat pengelolaan keuangan yang handal yang dapat mengeluarkan laporan keuangan untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan tingkat desa (Cheng, 2002).

Faktor keempat yang membutuhkan akuntabilitas adalah transparansi, yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan indikator penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara, dan dikatakan bahwa semakin terbuka setiap acara, semakin tinggi transparansi (Dilago, Lumolos, J., Waworundeng, & W, 2018).

Faktor terakhir yang mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa adalah aksesibilitas. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan berarti memberikan akses kepada banyak pihak yang berkepentingan dengan biaya rendah dan akses mudah ke laporan keuangan (Santi, Utary, & Kurniawan, 2018).

Kepala desa tercatat sebagai salah satu dari 5 besar pelaku korupsi di Indonesia, sesuai dengan kasus di kabupaten Pemalang, dimana kepala desa Gong saat ini dituduh menyalahgunakan sumber dana untuk pembangunan pemerintahan desa, termasuk Pendapatan Asli Desa (PAD), Bantuan Provinsi, Dana Desa (DD), dan pendapatan lain-lain sebesar Rp518,6 juta, dengan hukuman 3 tahun 10 bulan dan denda Rp50 juta (Baihaqi, 2019).

Rincian kasus tersebut dapat ditentukan dari fenomena problematika yang muncul, yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan anggaran dana desa, belum optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kurangnya transparansi informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya.. Penggunaan dana desa telah memicu berbagai asumsi sosial yang mengarah pada hal-hal yang lebih negatif, seperti penyelewengan dana, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan pertanyaan yang dapat diajukan yaitu: 1) Apakah komitmen organisasi berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 2) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 3) Apakah kompetensi pemerintah desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 4) Apakah transparansi berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 5) Apakah ketersediaan pelaporan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1) Untuk mengetahui dampak positif komitmen organisasi terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa. 2) Ditemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Pemahaman tentang kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4) Ditemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 5) Mengetahui aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Teori *Stewardship*

Menurut (Prasetyantoko, 2008), teori *stewardship* mengandung pengertian bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara inheren membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup dan saling tolong-menolong. Teori manajemen juga menggambarkan situasi di mana tujuan utama seorang manajer adalah memprioritaskan kebutuhan agensi di atas kebutuhan pribadi (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018). Berdasarkan teori manajemen, menjelaskan hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan agensi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai melalui upaya terbaik dari manajer dan *top level* untuk menggunakan nilai.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, dan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan berbagai urusan untuk keperluan keluarga desa dan pemerintahan umum, serta membina dan membina warga desa (Rohman, Ferina, & Ermadiani, 2018). Selain itu, pemerintah desa juga memiliki arti sebagai lembaga pemerintah yang berkewajiban mengelola wilayah di tingkat desa, dimana pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) (Mualifu, Guspul, & Hermawan, 2019).

2.3 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan dana desa adalah dana dari jejaring masyarakat pedesaan, yang dialokasikan kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.



2.4 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan tingkat pemahaman dan keterikatan individu pada suatu organisasi. Orang-orang dengan tingkat komitmen yang tinggi terhadap perusahaan cenderung melihat diri mereka sebagai anggota organisasi yang sebenarnya. Menurut (Steers & Porter, 1974), komitmen organisasi adalah sikap di mana individu mengidentifikasi dengan tujuan dan harapan organisasi di mana mereka bekerja dan berusaha untuk mempertahankan keanggotaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi adalah sikap yang mengikat seseorang terhadap organisasinya dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi pemerintah desa adalah kepala desa dan kader desa, serta merupakan bagian integral dari pemerintahan desa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa merupakan sikap kepala desa dan kader desa untuk berusaha mencapai tujuan organisasi.

2.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah rencana dan metode suatu badan atau organisasi untuk memelihara dan melindungi aset, menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi, dan membantu mematuhi kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015). Menerapkan pengendalian internal adalah alasan utama untuk memastikan bahwa proses pencapaian tujuan dilakukan dan bahwa tingkat risiko yang tidak terduga berkurang.

2.6 Kompetensi Pemerintah Desa

Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi pribadi untuk melakukan semua pekerjaan, dimana kompetensi dipengaruhi oleh dua dimensi, fisik dan intelektual (Robbins, 2007). Kompetensi terbagi menjadi tiga bidang, yaitu antara lain: pengetahuan (*knowledge*), sikap atau tingkah laku (*attitude*) yang meliputi: etis, emosional dan spiritual kecerdasan, dan keterampilan (*skill*) baik fisik maupun teknis (Indriasih, 2014).

2.7 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah pusat dan daerah dalam mengkomunikasikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada semua pihak, terutama yang membutuhkan. Transparansi mengacu pada kebebasan untuk memperoleh informasi kepentingan publik yang tersedia secara langsung bagi mereka yang terlibat (Mardiasmo, 2009).

2.8 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh banyak pihak (pemerintah) kepada pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi tentang keuangan daerah (Sari, 2017). Akuntabilitas dianggap efektif jika aksesibilitas publik terhadap pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah yang mudah dibaca dan dipahami. Akses dapat diperoleh dari berbagai media, seperti internet, majalah, radio, surat kabar dan televisi. Hak warga negara atas pelaporan anggaran merupakan bukti tanggung jawab dan kepengurusan (Mardiasmo, 2009).

2.9 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah diartikan sebagai pemberian informasi kepada mereka yang melaksanakan tugas atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik (Mahmudi, 2005). Dalam struktur pemerintahan, akuntabilitas memiliki arti sebagai bagian dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja serta tindakan masyarakat, pimpinan lembaga, dan badan hukum bagi yang mempunyai hak dan wewenang untuk memperoleh penjelasan dan pertanggungjawaban (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018).

2.10 Populasi dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif secara akurat dan sistematis menggambarkan peristiwa, situasi, dan situasi di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode empiris karena berpedoman pada filosofi positivis (Sugiyono, 2016). Disebut metode kuantitatif karena data yang digunakan menggunakan analisis data yaitu metode numerik (numerik) dan statistik, serta menggunakan pengujian hipotesis tentang tanggung jawab pengelolaan dana desa (DD).

Sumber data penelitian berasal dari tanggapan angket yang diuji oleh responden melalui uji validitas dan reliabilitas. Responden survei meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan BPD sebagai perwakilan pemerintah desa. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Petalugam Kabupaten Pematang yang berjumlah 19 desa. Penelitian menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah responden 76 orang. Proses analisis data menggunakan program SPSS versi 22, dan metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian prasyarat analisis meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hipotesis juga diuji dengan uji-t, uji-F dan koefisien determinan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Kualitas Data

3.1.1 Uji Validitas

Tingkat validitas alat penelitian dilakukan pada 45 pertanyaan kuesioner. Hasil pengolahan data uji instrumen pada output *Item Total Statistic* menunjukkan bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* pada item-item pertanyaan dalam kedua variabel yang diuji lebih besar dari r tabel sebesar 0,2257 dengan $N=76$ ($df = 76-2$ maka *table df* ke-74 yaitu 0,2257) serta tingkat kepercayaan 0,05 (5%), sehingga semua item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai guna mengetahui keandalan (*reliabel*) kuesioner yang dapat dilihat dari konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Suatu variabel dinyatakan *reliabel* jika menunjukkan r hitung > nilai *cronbach alpha* (0,70).

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha Based on Standardized			
Cronbach's Alpha	Items	N of Items	
.952		.962	6

Hasil pengujian yang terlihat pada tabel 1, menyatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki *Cronbach's alpha* di atas 0,70, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep umum pengukuran setiap variabel dalam kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian dan dianggap reliabel (*handal*).

3.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai fungsi guna memberikan gambaran suatu data dalam penelitian yang dilihat dari *mean*, maksimum, minimum, serta standar deviasi (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
AKUNTABILITAS	34.86	3.603	76
KOMITMEN	25.89	2.901	76
KOMPETENSI	38.09	4.231	76
SPI	60.54	5.763	76
TRANSPARASI	29.79	3.838	76
AKSESIBILITI	28.74	3.800	76

Analisis statistik deskriptif pada tabel 2, menunjukkan bahwa baik variabel independen maupun variabel dependen memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini baik.

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas memeriksa model regresi untuk melihat apakah variabel pengganggu (*sisa*) berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansinya $\geq 0,05$ maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya $\leq 0,05$ maka data tersebut dianggap tidak valid.

Tabel 3. Uji Normalitas Data

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		76
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,49917287
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,076
	<i>Positive</i>	,076
	<i>Negative</i>	-,074
<i>Test Statistic</i>		,076
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan nilai *Asymp. Sinyal (2-tail)* 0,200 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.



3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dipakai guna mengetes pada bentuk regresi dideteksi terdapatnya korelasi antara satu variabel bebas dengan lainnya. Model regresi dikatakan bagus apabila tanpa terdapat korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Hasil uji kolinearitas terlihat pada tabel 4:

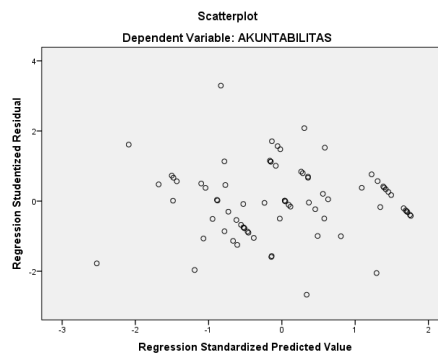
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	3.366	2.478		1.359	.179		
Komitmen Organisasi	.038	.064	.030	.587	.559	.929	1.076
Sistem Pengendalian Internal	.142	.073	.167	1.955	.055	.338	2.959
Kompetensi Pemerintah Desa	.138	.051	.221	2.703	.009	.367	2.725
Transparansi	.252	.097	.268	2.583	.012	.228	4.379
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.321	.108	.339	2.983	.004	.191	5.231

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dinyatakan model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 1, menunjukkan tidak ditemukan pola tertentu, dan titik-titik berdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat diterapkan.

3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel ataupun lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil perhitungan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.366	2.478		1.359	.179
Komitmen Organisasi	.038	.064	.030	.587	.559
Sistem Pengendalian Internal	.142	.073	.167	1.955	.055
Kompetensi Pemerintah Desa	.138	.051	.221	2.703	.009
Transparansi	.252	.097	.268	2.583	.012
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.321	.108	.339	2.983	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas



Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan angka yang berada pada *unstandardized coefficients betta* sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda berikut:

$$\hat{Y} = 3,366 + 0,038 X_1 + 0,142 X_2 + 0,138 X_3 + 0,252 X_4 + 0,321 X_5 + e$$

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika *p-value* > derajat keyakinan (0,05) yang artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	805.670	5	161.134	67.244	.000 ^b
	Residual	167.738	70	2.396		
	Total	973.408	75			

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

b. Predictors: (Constant), KOMITMEN, SPI, KOMPETENSI, TRANSPARASI, AKSESIBILITI

Hasil pengujian simultan diatas menunjukkan nilai sig. 0,000 < 0,05 Nilai F hitung adalah 67.244 > F Tabel 2.50, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ditetapkan memenuhi kriteria fit. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dapat menjelaskan keragaman akuntabilitas pengelolaan dana tingkat desa, sedangkan variabel seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kapasitas pemerintah desa, transparansi, dan akses pelaporan keuangan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3.5.2 Uji t

Uji statistik t dipakai guna menunjukkan hasil pengujian terhadap pengaruh nyata variabel bebas secara pribadi terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.366	2.478		1.359	.179
	Komitmen Organisasi	.038	.064	.030	.587	.559
	Sistem Pengendalian Internal	.142	.073	.167	1.955	.055
	Kompetensi Pemerintah Desa	.138	.051	.221	2.703	.009
	Transparansi	.252	.097	.268	2.583	.012
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	.321	.108	.339	2.983	.004

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Hasil pengujian parsial pada tabel 7, menunjukkan variabel komitmen organisasi adalah sig. 0,559 > 0,05 yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau H1 ditolak. Variabel sistem pengendalian intern adalah sig. 0,055 > 0,05 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau H2 ditolak. Variabel kapasitas pemerintahan desa memiliki nilai sig. 0,009 < 0,05 artinya kewenangan pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau H3 diterima. Variabel transparansi memiliki nilai sig. 0,012 < 0,05 menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa atau H4 diterima. Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai sig. 0,004 < 0,05 yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa atau H5 diterima.

3.5.3 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi yang diperoleh dengan menyesuaikan nilai *R-squared* dalam model regresi digunakan untuk menyatakan jumlah variabel dependen yang dapat dideskripsikan oleh variabel independen tersebut. Nilai *Adjusted R²* apabila berkisar 0-1 bermakna semakin kuat kemampuan variabel bebas bisa dijelaskan fluktuasi variabel terikat (Ghozali, 2018).

**Tabel 8.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.815	1.548

a. Predictors: (Constant), KOMITMEN, SPI, KOMPETENSI, TRANSPARASI, AKSESIBILITI
b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Hasil pengujian yang terlihat pada tabel 8, menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, kapasitas pemerintahan desa, transparansi dan aksesibilitas pelaporan keuangan adalah sebesar 0,815 atau 81,5%, dan sisanya sebesar 18,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian observasional ini.

3.6 Pembahasan

a. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,038. Tingkat signifikansi 0,559 ($p\text{-value} > 0,05$). Terlihat bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh (Cavoukian, 2010) mengemukakan lima elemen penting akuntabilitas, yaitu: (1). Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dan pelaksanaan kebijakan internal yang memenuhi standar eksternal, (2). Mekanisme penerapan kebijakan privasi, termasuk alat, pelatihan dan pendidikan, (3). Pemantauan internal dan eksternal dan sistem inspeksi jaminan, (4). Transparansi dan mekanisme partisipasi individu, dan (5). Sarana Pemulihan dan Penegakan Eksternal. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi, komitmen orang-orang dalam organisasi menjadi penting. Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa tindakan seseorang diatur oleh pikiran (ide) dan niat seseorang. Tujuan dapat dianggap sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh seorang individu. Jika seseorang berkomitmen pada suatu tujuan tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi perilakunya dan mempengaruhi kinerjanya (Suartana, 2010).

Karyawan dengan komitmen organisasi ditandai dengan keyakinan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi, kemauan untuk meningkatkan upaya untuk kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk tetap berada di organisasi (Salleh, Amin, Muda, & Abdul Halim, 2013). Lebih lanjut, (Cullen, Parboteeah, & Victor, 2003) menyatakan bahwa komitmen organisasi terkait dengan fenomena organisasi seperti perilaku kewarganegaraan, prestasi, dan produktivitas. Adanya komitmen organisasi mempengaruhi produktivitas karena karyawan mau bekerja keras (Riketta, 2002).

Hasil tes tersebut konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya. (Mamelo, 2016), (Ferina, 2016) dan (Fajri, 2015) mengemukakan bahwa pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Satu hal yang perlu disiapkan pemerintah desa adalah komitmen. Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan proyek dengan tepat. Keberhasilan pengelolaan dana desa secara bertanggung jawab merupakan bentuk pengelolaan keuangan desa khususnya ADD yang dilakukan oleh pemerintah sebagai komitmen pemerintah desa. Komitmen organisasi berdampak pada tanggung jawab keuangan (Zeyn, 2011).

Komitmen organisasi yang tinggi mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan alat psikologis untuk menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komitmen Organisasi yang lebih baik akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik, termasuk akuntabilitas keuangan.

b. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari hasil pengujian secara parsial bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai koefisien 0,142 dan tingkat signifikansi $0,055 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Pengelolaan Kabupaten Petarukan. Studi ini berhasil menunjukkan dampak signifikan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Elemen pengendalian internal yang baik seperti lingkungan pengendalian aparat pemerintah desa, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian dan penilaian risiko akan mendukung kemampuan aparat desa dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab (Sweetenia, Caesari, Aprillia, & Purwantini, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Arfiansyah, 2020), (Yulianti, Kamaliah, & Rasuli, 2019) dan (Yudianto & Sugiarti, 2018) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Mutmainah & Pramuka, 2017) dan (Pahlawan, Wijayanti, & Suhendro, 2020), yang mencatat bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari hasil uji parsial variabel kapasitas pemerintah desa diperoleh nilai koefisien 0,138 dan taraf signifikansi $0,009 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa kapasitas pemerintah desa berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan. Kajian ini berhasil menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang



kompeten, memadai, dan andal akan mendukung seluruh kegiatan pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam proses pelaporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan desa kepada masyarakat, sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bertanggung jawab (Yulianti, Kamaliah, & Rasuli, 2019).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian observasional sebelumnya oleh (Puspa & Prasetyo, 2020) dan (Rosyidi, 2018) yang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Subroto, 2009), (Widyatama, Novita, & Diarapati, 2017), dan (Sweetenia, Caesari, Aprillia, & Purwantini, 2019) yang menyimpulkan bahwa kapasitas pemerintah desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari hasil uji hipotesis uji t variabel transparansi diperoleh nilai koefisien 0,252 dan tingkat signifikansi $0,012 < 0,05$ maka dapat dikatakan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kecamatan Petarukan. Kajian ini berhasil menunjukkan bahwa kader desa memberikan keterbukaan dan kejelasan kepada warga tentang pengelolaan pemerintahan dan penggunaan dana desa melalui papan informasi atau poster yang dipasang di balai desa, sehingga memudahkan warga untuk memahaminya (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018).

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian observasional sebelumnya yaitu (Mualifu, Guspul, & Hermawan, 2019) dan (Ngakil & Kaukab, 2020) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2016) dan (Sukmawati & Nurfitriani, 2016) yaitu anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa tidak transparan.

e. Pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dilihat dari hasil uji hipotesis uji t variabel aksesibilitas laporan keuangan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,321 dan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Petarukan. Kajian ini berhasil menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah desa, seperti melalui *website* resmi desa sebagai sarana bagi warga untuk dengan mudah menemukan dan memperoleh laporan pertanggungjawaban proses pengelolaan pemerintahan. (Sande, 2013).

Hasil penelitian observasional ini sejalan dengan observasi (Superdi, 2017), (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018), dan (Musdalifah, 2020). bahwa aksesibilitas pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap Penelitian (Azizah, 2014) bertentangan dan didukung oleh studi (Puspa & Prasetyo, 2020), yang menyatakan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan guna menguji pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Objek studi pengamatan ini yaitu perangkat desa di semua desa yang terletak di Kecamatan Petarukan dengan total responden 76 orang. Setelah melakukan studi pengamatan didapatkan kesimpulan komitmen organisasi pemerintah desa dan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Petarukan. Sedangkan kompetensi pemerintah desa, transparansi, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Petarukan. Berdasarkan pengalaman secara langsung dilokasi penelitian selama proses studi pengamatan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain jumlah populasi terbatas dimana desa se-Kecamatan Petarukan yang berjumlah 19 desa, sehingga penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan di lingkungan Kecamatan lain di Kabupaten Pemalang. Dalam proses pengambilan data informasi yang diberikan oleh responden dengan melalui kuesioner tidak bisa menunjukkan pendapat serta keadaan tempat responden bekerja yang sesungguhnya. Hal tersebut terjadi sebab terdapatnya perbedaan pemikiran, anggapan serta pemahaman berbeda antara responden satu dengan responden lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi juga seperti kejujuran responden dalam pengisian kuesionernya.

REFERENCES

- Aramide, Sanusi, S., & Mustapha. (2015). The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM)*.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Vol 3 (1)*, 67-82.
- Azizah, N. (2014). Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan. *jr.am.polinema. ac.id index.php*.
- Baihaqi. (2019). *Selewengkan Dana Desa, Mantan Kades dari Pemalang Dituntut 3 Tahun 10 Bulan*. Dipetik Januari 2021, dari Jatengtoday.com: <https://jatengtoday.com>
- Bayu, D. J. (2020). *Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020*. Dipetik Januari 2021, dari databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id>



- Cavoukian, A. (2010). Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Business Practices. 409.
- Cheng, R. H. (2002). Educating Government Financial Managers: University collaboration Between Business and Public Administration. *The Journal of Government Financial Management*, Vol.5 (3), 10-15.
- Cullen, J., Parboteeah, K., & Victor, B. (2003). *The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment. A Two Study Analysis* (Vol. Vol. 46). Journal of Business Ethics.
- Dilago, R., Lumolos, J., Waworundeng, &, & W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 (1), 1-9.
- Fadil, M. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). *Jurnal Accounting fakultas ekonomi dan bisnis*, Vol.2 (2), Hal 1-12.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1099-1104.
- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono. (2018). Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8*.
- Ferina, I. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol. 14, 321-336.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (8), 1-15.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen.
- Indriasih, D. (2014). The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting In Local Government. *Accounting Doctoral Program Faculty of Economics and Business Padjajaran University Indonesia*, vol 5, No.20 ISSN 2222-1697.
- James, S. d. (2003). *Time Management*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI).
- Kompri. (2017). *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik Profesional*. Jakarta : Kencana.
- Krismiaji, D. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Lamo, A. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Lembaga Administrasi negara dan Badan Pengawasan , & Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5 (Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)*. Jakarta: LAN BPKP RI.
- Lewier, C., & Kurniawan, C. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik: UPP STIM YKPN*.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mamelo, G. (2016). Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol. 07, 148-159.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moehiono. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mohamad, I. e. (2004). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua*. Diambil kembali dari <http://www.lan.go.id>.
- Motik, & Suryani, S. (2003). *Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pememintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, Vol 1, 49-59.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon. *Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan*, 1-20.
- Musthofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemasang. *Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765*.
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*.
- Narsa, N. P. (2017). SAK-ETAP Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(1), 44-65.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Universitas Jenderal Soedirman*, vol 3 (2), 92-107.
- Pahlawan, E., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*.
- Prabawa, D., & Lukiastuti, F. (2017). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko Dan Manajemen Modal Kerja Terhadap Return Saham*. Jurnal Manajemen Indonesia.
- Prasetyantoko, A. (2008). *Coporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Primayani, P. R., Herawati, N. T., & Darmawan, N. (2014). Pengaruh pengendalian internal, Value for money, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (studi empiris pada SKPD di Pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(1).



- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 20* (2), 281-298.
- Ramadhan, A. (2020, Februari 2). *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak muncul Pada 2019*. (K. Erdianto, Editor) Dipetik Desember sabtu, 2020, dari Kompas.com: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>
- Riketia, M. (2002). Attitudinal Organizational Commitment and Job Performance: A Meta-Analysis. *Journal of Organizational Behavior, Vol. 23*, 257-266.
- Robbins, S. P. (2007). *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rohman, A., Ferina, I. S., & Ermadiani. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *Faculty of Economics and Business Riau University, 1*, 1-14.
- Rudana, N. (2005). Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi: Universitas Diponegoro*.
- Sagala, & Rivai. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Rajawali Pers.
- Salleh, M., Amin, A., Muda, S., & Abdul Halim, M. (2013). *Salleh, Munir., Amin, Aziz., Muda, Shalahudin., dan Abdul Halim, Muhammad Abi Sofian. 2013*. (Vol. Vol. 09). Asian Social Science.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Sangki, A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2016). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi*.
- Santi, Y. W., Utary, A. R., & Kurniawan, I. S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, Vol.3* (2), 281-297.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Faculty of Economics Riau University, 4*, 571-586.
- Satrio, A. D. (2019). *ICW: Total Ada 212 Tersangka Dana Desa Sejak 2016 hingga 2018*. Dipetik Desember sabtu, 2020, dari okezone.com: <https://nasional.okezone.com/amp/2019/11/08/337/2127415/icw-total-ada-212-tersangka-dana-desa-sejak-2016-hingga-2018>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Edisi 6.
- Steers, & Porter. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians. *Journal Applied of Psychology*, 603-609.
- Suartana, I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.
- Sudarmanto. (2018). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*.
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. *Faculty of Economics Riau University, Vol. 4* (1), 2015-2029.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Vol 17*, 2579-647.
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Widjaja. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2*(2), 1-20.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran*.
- Yulianti, W., Kamaliah, & Rasuli. (2019). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Vol 27*, 386-398.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 21*-37.